

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain : keterbukaan / transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh stakeholder utamanya masyarakat luas sehingga mampu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menentukan yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPPEDA juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah. Urusan yang ditangani meliputi urusan perencanaan, urusan tata ruang dan urusan statistik, sehingga pada prinsipnya tugas pokok dan fungsi Bappeda meliputi tiga hal yaitu :

- a. Fungsi perencanaan;
- b. Fungsi koordinasi pembangunan; dan
- c. Fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Di samping ada tugas-tugas lainnya antara lain memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka menentukan kebijakan pembangunan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:

1. Kepala BAPPEDA

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- b. penyusunan program perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- e. koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah diantara lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga lain yang ada di daerah serta koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, pemerintahan dan kesra, fisik dan prasarana wilayah, data dan statistik, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris BAPPEDA

Sekretaris BAPPEDA mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap rencana kerja; pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Badan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja,

- penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana kerja, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan /bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja, koordinasi, pembinaan/bimbingan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan guna mewujudkan tertib administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja dan anggaran, administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan prgram kerja dan anggaran, adminstrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan badan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan–bahan penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja, pelayanan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan inventaris;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang ekonomi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, distribusi, jasa dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang ekonomi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, distribusi, jasa dan keuangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang ekonomi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, distribusi, jasa dan keuangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang ekonomi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, distribusi, jasa dan keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang ekonomi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, distribusi, jasa dan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Kepala Sub Bidang Produksi dan Distribusi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi serta perdagangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang produksi dan distribusi yang meliputi pengumpulan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan

pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi;

- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang produksi dan distribusi yang meliputi pengumpulan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memeberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang produksi dan distribusi yang meliputi pengumpulan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang produksi dan distribusi yang meliputi pengumpulan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan energi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Kepala Sub Bidang Jasa dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan transportasi, komunikasi, koperasi, jasa, industri, dunai usaha dan perbankan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Jasa dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang transportasi dan komunikasi, perdagangan, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan ;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang transportasi dan komunikasi, perdagangan, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang transportasi dan komunikasi, perdagangan, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan;

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang transportasi dan komunikasi, perdagangan, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang pemerintahan dan kesra yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesbangpolinmas, agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang pemerintahan dan kesra yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesbangpolinmas, agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang pemerintahan dan kesra yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesbangpolinmas, agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang pemerintahan dan kesra yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesbangpolinmas, agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan kesra yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesbangpolinmas, agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga

kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1. **Kepala Sub Bidang Pemerintahan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan prasarana sosial dan pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesbangpolinmas, keamanan dan ketertiban;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesbangpolinmas, keamanan dan ketertiban;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesbangpolinmas, keamanan dan ketertiban;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, kesbangpolinmas, keamanan dan ketertiban;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. **Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Prasarana Wilayah

Kepala Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, tata ruang dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Fasilitas Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang fisik dan prasarana wilayah yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam, tata ruang dan prasarana wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang fisik dan prasarana wilayah yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam, tata ruang dan prasarana wilayah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang fisik dan prasarana wilayah yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam, tata ruang dan prasarana wilayah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang fisik dan prasarana wilayah yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam, tata ruang dan prasarana wilayah;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang fisik dan prasarana wilayah yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam, tata ruang dan prasarana wilayah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan tata ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Kepala Sub Bidang Prasarana wilayah

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana jalan dan jembatan, perhubungan, gedung, pengairan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana jalan dan jembatan, perhubungan, gedung, pengairan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana jalan dan jembatan, perhubungan, gedung, pengairan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana jalan dan jembatan, perhubungan, gedung, pengairan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Bidang Statistik, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penilaian dan penyajian data statistik serta dokumentasi dalam rangka perencanaan pembangunan; pelaksanaan dan fasilitasi perizinan penelitian dan riset; serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang statistik, pengendalian dan evaluasi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang statistik, pengendalian dan evaluasi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan;

- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang statistik, pengendalian dan evaluasi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang statistik, pengendalian dan evaluasi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang statistik, pengendalian dan evaluasi yang meliputi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Kepala Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penilaian dan penyajian data statistik serta dokumentasi dalam rangka perencanaan pembangunan serta penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi serta pemberian izin riset dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang

penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset;

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis penilaian dan penyajian data statistik, dokumentasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi perizinan, penelitian dan riset;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Mempunyai tugas pelaksanaan pengendalian, monitoring, penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya aparatur pada tahun 2016 sebanyak 41 orang, sebagian besar atau paling banyak ada di Sekretariat yaitu 16 orang sedangkan paling sedikit ada di bidang SPE dan bidang Pemerintahan dan Kesra karena hanya ada 5 orang pegawai, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Pegawai Aktif Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Sesuai Bidang Tugas

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat	-	3	6	1	6	16
3	PemKesra	-	-	4	-	1	5
4	Ekonomi	-	-	4	1	1	6
5	FISPRAS	-	1	5	1	1	8
6	SPE	-	-	1	2	2	5
7	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-
Jumlah (Orang)		-	4	20	6	11	41

Dari sisi latar belakang pendidikan, sumber daya aparatur BAPPEDA yang berjumlah 41 orang tersebut cukup beragam. Sebagian besar yaitu sebanyak 17 orang berpendidikan sarjana, berpendidikan pasca sarjana sebanyak 7 orang, berpendidikan diploma III sebanyak 4 orang, berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang, berpendidikan SLTP sebanyak 4 orang dan berpendidikan SD sebanyak 1 orang.

Jumlah pegawai BAPPEDA berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SAR MUD	S-I	S-2	S-3	
1	Sekretariat	1	2	4	3	5	2	-	17
2	PemKesra	-	-	-	-	3	1	-	5
3	Ekonomi	-	-	-	1	3	2	-	6
4	FISPRAS	-	-	1	1	4	2	-	8
5	SPE	-	-	1	-	2	2	-	5
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-

Adapun dari sisi sara prasarana, peralatan yang berkondisi baik sebesar 651 buah dan kondisi rusak sejumlah 490 peralatan. Selengkapnya kondisi prasarana kerja yang ada sebagai berikut

Tabel 3
Jumlah Prasaran Kantor BAPPEDA Tahun 2016

SARANA	JUMLAH	
Mobil	8	Unit
Motor	31	Unit
AC	23	Unit
Alat Pemadam	2	Unit
Penghancur Kertas	4	Unit
Brankas	1	Unit
Buffet Kayu	2	Unit
Computer Compatible	1	Unit
CPU	13	Unit
Filling	47	Unit
Handycam	3	Unit
Hard Disk Ext	18	Unit
Kardek Kayu	1	Unit
Karpet	3	Unit
Korden	3	Unit
Kursi Pegawai	37	Unit
Kursi Eselon III	6	Unit
Kursi Eselon IV	10	Unit
Kursi Eselon V	3	Unit
Kursi Lipat	1	Unit
Kursi Rapat	49	Unit
Kursi Tamu (Set)	6	Unit
Tablet	7	Unit
Laptop	4	Unit
Layar LCD	1	Unit
Lemari Es	1	Unit
Lemari Instrumen	1	Unit
Lemari Kaca	2	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
Server	2	Unit
Meja Besi	2	Unit
Meja Komputer	15	Unit
Meja Rapat	21	Unit
Meja Tamu (Set)	1	Unit
Meja Tamu Eselon III	1	Unit
Mesin Absensi	1	Unit

SARANA	JUMLAH	
Mesin Ketik	3	Unit
Mesin Penghisap Debu	1	Unit
Monitor	5	Unit
Notebook	29	Unit
Pc Unit	11	Unit
Printer	36	Unit
Rak Arsip	8	Unit
Rak Besi	17	Unit
Rak Kayu	6	Unit
Scanner	2	Unit
Sofa	1	Unit
Sound System	4	Unit
Televisi	4	Unit
UPS	1	Unit
Whiteboard	2	Unit
Perekam	4	Unit
Fax	1	Unit
Camera	6	Unit
GPS	2	Unit
Pesawat Telepon	1	Unit
MMP	6	Unit
Intercom	1	Unit
Pabx	1	Unit

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -2021

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga. Renstra Bappeda kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021, menunjukkan komitmen yang berisi sasaran yang akan dicapai, strategi dan faktor pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi BAPPEDA yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran BAPPEDA.

Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di bidang perencanaan dan pembinaan perencanaan kepada seluruh SKPD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah :

**"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Guna mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 di atas, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Kab. Purbalingga

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran rencana strategis Bappeda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, yang ditandai dengan masuknya Purbalingga sebagai nominator Anugerah Pangripta Abipraya	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Nilai evaluasi AKIP	Membangun SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas	Peningkatan SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk menaati prosedur dan jadwal proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD		
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP				
		Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan				
Penguatan kelembagaan inovasi daerah yang ditandai dengan masuknya inovator Purbalingga menjadi nominator krenova	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbang	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders kelitbang untuk meningkatkan kualitas hasil kelitbang yang sesuai kebijakan pembangunan daerah	Fasilitasi penerapan berbagai hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah		
		Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek				
Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, yang ditandai dengan tingkat keterisian data informasi pembangunan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah	Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Penyediaan data dan informasi pembangunan yang <i>reliable</i> dan <i>up to date</i>		
		Tingkat Keterisian Data dalam SIPD				
		Cakupan ketersediaan data dasar dan Informasi pembangunan				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
daerah sebesar 90 persen				
Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas,	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)	Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang

C. Program

Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPEDA menggambarkan domain BAPPEDA dalam perencanaan daerah yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah serta penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 maka RENSTRA BAPPEDA berisi 7 program yakni :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

D. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2016

Dalam rencana kinerja Tahun 2016 BAPPEDA, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Kerja Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	40 persen
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Sesuai
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen
	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 %
Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	2 dok
	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra
Meningkatnya kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah	Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	27 unit
	Tingkat Keterisian Data dalam SIPD	8 unit pokok data
	Cakupan ketersediaan data dasar dan Informasi pembangunan	4 buku (Profil Purbalingga, PDRB, IHK dan NTP)
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)	100 persen terlayani

E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan Tahun 2017, telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang akan disepakati antara kepala BAPPEDA dengan kepala daerah Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 % ditindaklanjuti
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	40 persen
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen sesuai
		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 persen sesuai
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen sesuai
		Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 persen tercapai
3	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	4 rekomendasi
		Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	5 mitra

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.843.751.000
1	Evaluasi RKPD Tahun 2017	82.055.000
2	Fasilitasi FEDEP	139.715.000

KEGIATAN	ANGGARAN
3 Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)	130.000.000
4 Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	175.000.000
5 Fasilitasi Program Kota Hijau, Eco Distrik dan P3KP	92.600.000
6 Fasilitasi PUS	74.790.000
7 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)	192.071.000
8 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	139.805.000
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Keciptakarya dan Penataan Ruang Daerah	74.695.000
10 Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	79.725.000
11 Pendampingan Program WISMP	128.700.000
12 Pendampingan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat	59.935.000
13 Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	75.000.000
14 Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah	99.660.000
15 WISMP	300.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	944.635.000
1 Fasilitasi SIMRENDA	69.800.000
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi	49.805.000
3 Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Bidang Energi Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	25.000.000
4 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	41.440.000
5 Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017	70.000.000
6 Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017	119.850.000
7 Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018	124.720.000
8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	50.000.000
9 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017	119.500.000
10 Penyusunan RKPD Tahun 2018	199.700.000
11 Review Rencana Program Investasi jangka menengah (RPIJM) Keciptakarya	74.820.000
Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	452.085.000
1 Analisis Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016	68.955.000

KEGIATAN	ANGGARAN
2 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000
3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah	74.820.000
4 Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian	25.000.000
5 Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	68.260.000
6 Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan	65.050.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	996.480.000
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	285.227.000
2 Penataan Arsip	20.000.000
3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	102.000.000
5 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	322.058.000
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	40.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	207.195.000
Jumlah	4.236.951.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigmapenganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappeda Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin tahun 2016. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

A. KINERJA SASARAN

Hingga akhir tahun 2016, BAPPEDA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan,

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 14 dalam penilaian pangripta abripraya dari target Renstra 2016 - 2021 menjadi nominator anugrah abipraya (10 besar).

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik (79,68)	100 persen
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	40 persen	25 persen	62,50 persen
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	92/98 (96 persen)	96 persen
	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Sesuai	Blm tersedia	Blm tersedia
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen		
	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	100 %		

2. Tujuan : Penguatan kelembagaan inovasi daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan inovatornya menjadi juara harapan dan sekaligus menjadi juara favorit yakni inovasi berupa **Teleskop Batu Akik** pada ajang krenova tingkat provinsi Jawa Tengah.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	2 dok	2 dok (SIDA dan Kajian Perceraian)	100 persen
	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra	6 mitra (Unsoed, UMP, Poltekkes Jakarta, UGM, Ibaraki University, Balitbangprov Jateng)	100 persen

3. Tujuan : Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah	Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	27 SKPD	27 SKPD	100 persen
	Tingkat Keterisian Data dalam SIPD	8 kelompok data	8 kelompok data (1.465 elemen data terisi dari 2.221 eldat wajib terisi (69,7 %))	84,79 persen
	Cakupan ketersediaan data dasar dan Informasi pembangunan	4 buku (Profil Purbalingg, PDRB, IHK dan NTP)	4 buku (Profil Purbalingga, PDRB, IHK dan NTP)	100 persen

4. Tujuan : Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)	100 persen terlayani	Semua terlayani (155 permohonan informasi tata ruang) 104 rekomendasi (68 sesuai 36 tidak sesuai) dan 51 permohonan informasi	100 persen

B. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- 2) Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-lata listrik, perangkat dan materai, peralatan kebersihan, gas, umbul-umbul, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, fotocopy dan makan minum
- 3) Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- 4) Anggaran kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran ini sebesar Rp433.704.000,-realisasinya sebesar Rp 414.417.859,- atau 95,55 %.
- 5) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- 6) Upaya Pemecahan Masalah: tidak ada.

b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah

- 2) Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
 - 3) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mengadakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah
 - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 299.685.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 299.685.000,- atau 100,00 %.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi : banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia
 - 6) Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
 - 2) Hasil kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
 - 3) Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasarana kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
 - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp349.912.000,- dan realisasinya sebesar Rp 289.300.125,- atau 82,68 %.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi (IT)
 - 6) Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
 - 2) Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan maupun spesifikasinya, adapun aset yang dipelihara pada Bappeda Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
 - a) Sepeda Motor 5 buah
 - b) Rak Arsip 4 buah
 - c) Filling Kabinet 4 buah
 - d) Kursi Tamu 1set
 - e) AC Split 1 buah

- | | |
|---------------------|--------|
| f) Note book | 7 buah |
| g) Komputer PC | 1 buah |
| h) Hardisk External | 2 buah |
| i) Printer | 4 buah |
| j) Garasi Mobil | 1 buah |
- 3) Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
 - 4) Anggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor tahun 2016 sebesar Rp. 262.350.000,- dan realisasinya Rp 229.812.000,- atau 87,60 %.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi, tidak ada.
 - 6) Upaya Pemecahan Masalah, tidak ada.
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- 1) Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
 - 2) Hasil kegiatan adalah pengiriman peserta baik seminar, diklat dan sosialisasi.
 - 3) Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud.
 - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 16.194.927,- atau 80,97 %.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.
 - 6) Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
- 1) Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
 - 2) Hasil Kegiatan adalah 1 dokumen renja SKPD, 1 dokumen LKD, 1 Dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJ Ip.
 - 3) Sasaran dari kegiatan ini adalah agar program dan kegiatan Bappeda dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi.
 - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp18.425.000,- atau 92.13 %.
 - 5) Permasalahan yang Dihadapi : penyusunan LKPJ dan LKJ Ip tergantung pada penyelesaian dari seluruh SKPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJ IP sering terlambat,

- 6) Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 9 kegiatan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016
- 1) Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan mendapatkan masukan rancangan awal RKPD tahun 2017.
 - 2) Hasil kegiatan terlaksananya diskusi pembangunan yang dihadiri 320 peserta dari komisi-komisi DPRD, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan para Kepala SKPD, para Camat, kasi ekbang dan delegasi kecamatan, perguruan tinggi, instansi vertikal, perbankan, bumd, Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi usaha dan LSM, paguyuban kepala desa (Wirapraja) dan forum komunikasi perangkat desa (FK Persada), pemangku kepentingan lainnya. Terlaksananya 4 forum diskusi kelompok yaitu bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup dan infrastruktur wilayah, bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Terserapnya aspirasi masyarakat sebanyak 1132 usulan kegiatan atau sebesar Rp 422.153.053.000,-
 - 3) Sasaran kegiatan adalah terselenggaranya forum musyawarah perencanaan pembangunan yang transparan, demokratis dan akuntabel.
 - 4) Anggaran jumlah anggaran Rp 62.770.000,- Realisasi Rp 58.342.617,- atau 92,95 %.
 - 5) Permasalahan : masih rendahnya usulan untuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia sebesar 13 persen (pendidikan dan kesehatan) dan masih didominasi oleh usulan infrastruktur yakni sebesar 54 %.
 - 6) Solusi : sosialisasi pentingnya pembangunan kesehatan dan pendidikan dilingkungan masyarakat.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
 - 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- b. Penyusunan RKPD Tahun 2017
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
 - a) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017;
 - b) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
 - c) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

- d) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- 2) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
 - 3) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 300 buku RKPD Musrenbangkab Tahun 2016, 200 buku rancangan teknokratis awal RKPD tahun 2017, 100 buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017.
 - 4) Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Anggaran sebesar Rp.140.000.000,- realisasi Rp 135.635.290 (96,88 %)
 - 6) Permasalahan tidak ada.
 - 7) Solusi tidak ada.
 - 8) Kondisisaranadanprasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
 - 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- c. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2017 adalah
 - a) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2017;
 - b) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD
 - 2) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 80 buku KUA Tahun 2017, 80 buku PPAS Tahun 2017.
 - 3) Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 4) Anggaran sebesar Rp.100.554.000,- realisasi Rp. 98.096.012,- (97,56%)
 - 5) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - 6) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.

- 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- d. Penyusunan RPJMD 2016 – 2021
- 1) Maksud kegiatan adalah (1) melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. (2) RPJMD 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat SKPD; (4) RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - 2) Sasaran kegiatan : DPRD, Seluruh OPD, seluruh komponen masyarakat dan *stakeholders* terkait.
 - 3) Hasil kegiatan : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Program Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.
 - 4) Anggaran sebesar Rp. 281.000.000 dengan realisasi anggaran : Rp. 259.965.056,- atau 92,51 persen.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi : Terbitnya peraturan/regulasi baru berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang berimplikasi kepada harus disesuaikan prosedur, tata cara serta substansi RPJMD, yang membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama diantara segenap penyusun.
 - 6) Solusi yang ditempuh : Melaksanakan Bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kementerian dalam negeri, Kementerian PAN-RB, Bappeda Provinsi, dll) serta saling komunikasi dengan kabupaten/Kota lain.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
 - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- e. Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan th 2016
- 1) Maksud Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah adalah memberikan arahan

dalam tataran teknokratik atas pelaksanaan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab serta dalam penyusunan Renja SKPD.

- 2) Hasil kegiatan adalah (1) Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2016 untuk penyusunan RKPD tahun 2017; (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk penyusunan RKPD tahun 2018
 - 3) Sasarannya yaitu adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.;
 - 4) Anggaran sebesar Rp.15.630.000,- realisas iRp. 12.259.400,- (78,44 %)
 - 5) Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD.
 - 6) Permasalahan yang dihadapi tidak ada
 - 7) Solusi yang ditempuh tidak ada.
 - 8) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
 - 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- f. Penyusunan RKPD Perubahan 2016
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan adalah
 - a) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2016;
 - b) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - c) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - d) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarurusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
 - 2) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016.
 - 3) Hasil kegiatan adalah tersusunnya, 80 buku Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2016
 - 4) Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi Rp 82.975.671,- (82,98 %)
 - 6) Permasalahan tidak ada.
 - 7) Solusi tidakada.

- 8) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
 - 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- g. Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2016 adalah
 - a) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016;
 - b) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
 - 2) Hasil kegiatan adalah tersusunya 80 buku KUA Perubahan Tahun 2016, 80 buku PPAS Perubahan Tahun 2016.
 - 3) Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
 - 4) Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-realisasiRp. 68.816.131,- (91,76%)
 - 5) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - 6) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
 - 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- h. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2016-2021
- 1) Maksud dari penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah (1) Melakukan Kajian tentang dampak lingkungan terhadap dokumen penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; (2) Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan sudah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga;
 - 2) Hasil kegiatan adalah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga
 - 3) Sasarannya adalah Menilai kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sudah melihat/memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - 4) Anggaran sebesar Rp. 114.250.000,- realisasi Rp. 96.555.671,- (84,51 %).
 - 5) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - 6) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.

- 7) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- i. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana
 - 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 2 (dua) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - 2) Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana.
 - 3) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.100.000,- atau 97,75 %.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan untuk diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana.
 - 6) Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya agar menyesuaikan standarisasi dan volumenya.
3. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 15 kegiatan meliputi:

- a. Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK dan Bantuan Gubernur
 - 1) Maksud kegiatan : Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK, dan Ban-Gub dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan bersumber dana TP, DAK, dan Ban-Gub
 - 2) Sasaran kegiatan: Seluruh OPD khususnya pengampu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Gubernur (Ban-Gub) Tahun 2016.
 - 3) Hasil kegiatan: Laporan Triwulan kegiatan DAK, TP, dan Ban-Gub tahun 2016.
 - 4) Anggaran sebesar Rp. 72.500.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 61.445.575,- (Enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 84,75 persen
 - 5) Permasalahan yang dihadapi: Belum semua OPD dapat melaporkan kegiatan secara tepat waktu, sehingga menghambat kelancaran dalam pelaporan ke Provinsi.
 - 6) Solusi yang ditempuh : Meminta/menagih laporan secara intensif sampai pada jempit bola ke masing-masing OPD.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik
 - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- b. Fasilitasi FEDEP
 - 1) Maksud Kegiatan: FEDEP adalah memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha sebagai mitra pemerintah Kabupaten

dalam menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Dan memberikan fasilitasi kepada pelaku ekonomi lokal khususnya UMKM dengan pendekatan klaster agar bisa meningkatkan kemampuan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk daerah

- 2) Hasil Kegiatan: (1) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pelaku UMKM; (2) Adanya koordinasi yang baik antara pokja FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Provinsi Jawa Tengah dengan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) Kabupaten Purbalingga; (3) Promosi produk unggulan melalui kegiatan pameran.
 - 3) Sasaran kegiatan : (1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM; (2) Meningkatnya promosi produk dan potensi ekonomi local; (3) Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 - 4) Anggaran sebesar Rp. Rp. 120.000.000,00 dan realisasi anggaran : realisasi kegiatan sebesar 100%, realisasi SPMU sebesar Rp. 112.155.200 ,- (93 %) dan realisasi SPJ sebesar Rp. 112.155.200 ,- (93 %)
 - 5) Permasalahan yang dihadapi : Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
 - 6) Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitas nya.
 - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.
- c. Pendampingan Program WISMP
- 1) Maksud Kegiatan: (1) penyediaan Dana pendampingan sebagai salah satu syarat luncuran dana LOAN dalam kegiatan WISMP setiap tahunnya. (2) Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A dalam PPSIP
 - 2) Hasil Kegiatan : (1) Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP Pengadaan Kendaraan Operasional kegiatan WISMP (2) Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM
 - 3) Sasaran Kegiatan: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
 - 4) Anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- realisasi Rp. 208.884.886,- 97,16)
 - 5) Permasalahan yang dihadapi: Masih adanya konflik perebutan air
 - 6) Solusi yang ditempuh: Rapat - rapat koordinasi
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik
 - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
 - 9) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.

- 10) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- d. Evaluasi RKPD Tahun 2016
- 1) Maksud kegiatan: 1. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2015 dengan mendasarkan pada target tahun 2015, sekaligus mengetahui kendala yang dijumpai dalam pencapaian target, sehingga dapat ditentukan prioritas pembangunan pada tahun mendatang; 2. Menyediakan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan dan RKPD tahun depan;
 - 2) Sasaran kegiatan : Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) kabupaten Purbalingga
 - 3) Hasil kegiatan: Tersedianya hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan
 - 4) Anggaran sebesar Rp. 81.950.000,- dan Realisasi anggaran : Rp. 77.338.050,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau 94.37 persen.
 - 5) Permasalahan yang dihadapi : Masih relatif rendahnya kesadaran beberapa OPD terkait pentingnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghambat kelancaran pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Solusi yang ditempuh: Sosialisasi dan Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang kewajiban OPD dalam evaluasi Rencana Kerja masing-masing.
 - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
 - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- e. Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata
- 1) Maksud kegiatan :
 - a) Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga.
 - b) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - c) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
 - d) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e) Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga

- 2) Sasaran kegiatan :
 - a) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
 - b) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
 - c) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- 3) Hasil kegiatan :
 - a) Terfasilitasinya mahasiswa dari 6 (enam) perguruan tinggi dan 833 mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
 - b) Terlaksananya / teracarakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - c) Terdatanya permasalahan riil dalam masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
 - d) Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
 - e) Tersusunya laporan kegiatan KKN tahun 2016
- 4) Anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 159.050.513,- (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah). atau 93,01 persen
- 5) Permasalahan yang dihadapi :
 - a) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
 - b) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja
 - c) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
 - d) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- 6) Solusi yang ditempuh :
 - a) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
 - b) Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat

- c) Optimalisasi koordinasi dengan OPD SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- f. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bangub)
 - 1) Maksud kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan koordinasi dan konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
 - b) Memperkuat dan mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.
 - c) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga
 - d) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
 - e) Merumuskan kesepakatan, kebijakan dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektifitas program penanggulangan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari berbagai *stakeholder*.
 - 2) Sasaran kegiatan :
 - a) OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
 - b) Organisasi masyarakat yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan
 - c) BUMD Kabupaten Purbalingga
 - d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga
 - 3) Hasil kegiatan :
 - a) Laporan hasil kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga
 - b) Inventarisasi berbagai permasalahan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
 - c) Hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga
 - d) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
 - 4) Realisasi anggaran: Rp. 129.276.605,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) atau 57.95 persen
 - 5) Permasalahan yang dihadapi :

- a) Relatif rendahnya capaian kinerja keuangan disebabkan karena belanja jasa pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan yang telah dianggarkan tidak dicairkan karena berdasarkan hasil rapat koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan tanggal 1 Desember 2016 disampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah melalui TKPK sedang membuat SIM Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan on line dengan 35 kabupaten/ kota. Namun sampai dengan akhir Desember 2016 kami konfirmasi ternyata SIM dimaksud belum siap didistribusikan kepada kabupaten/ kota.
 - b) Perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penguatan TKPK Kabupaten Purbalingga.
 - c) Belum semua OPD menggunakan single data dalam penentuan sasaran/ targetting program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Solusi yang ditempuh :
- a) Perlu ada kajian pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan guna mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan pada seluruh OPD.
 - b) Dalam rangka akurasi penentuan sasaran / targetting perlu dilakukan data tunggal dan tersosialisasikan kepada seluruh OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:
Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- g. Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil
- 1) Maksud Kegiatan :
- a) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
 - b) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan tersebut;
 - c) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
 - d) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
- 2) Sasaran kegiatan :

- a) Program dan kegiatan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :
 - b) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
 - c) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di kabupaten Purbalingga.
- 3) Hasil kegiatan :
 - a) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
 - b) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
- 4) Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 24,134.000,- (96,54 %).
- 5) Permasalahan yang dihadapi :
 - a) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil termonev semuanya;
 - b) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil sebagai anggota tim Monev.
- 6) Solusi yang ditempuh :
 - a) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
 - b) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Maksud Kegiatan : Terlaksananya pendampingan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan kelanjutan dari Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang juga merupakan kelanjutan dari Program PNPM Perkotaan serta pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di 44 Kelurahan/Desa

pada 3 Kecamatan yaitu Purbalingga, Padamara dan Kalimanah sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan sanitasi (USRI).

- b. Hasil Kegiatan: Hasil kegiatan berupa dokumen laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur penanganan kawasan kumuh perkotaan di 5 kelurahan prioritas dan baseline dokumen perencanaan pencegahan dan penanganan kumuh di 44 Kelurahan/Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh (RPLP)
- c. Sasaran Kegiatan: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hasil bentukan BKM di 44 Kelurahan/Desa pada 3 Kecamatan yaitu: Purbalingga, Padamara dan Kalimanah
- d. Anggaran sebesar Rp. 60.000.000.- dengan realisasi Anggaran Rp. 58.832.595,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen).
- e. Permasalahan yang dihadapi: Keterbatasan data-data teknis yang dimiliki serta belum adanya Pokja yang khusus menangani permasalahan perumahan dan permukiman serta pembangunan sanitasi di Purbalingga.
- f. Solusi yang ditempuh: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dan juga terhadap stakeholders lainnya terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.
- g. Kondisi sarana dan prasarana: Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatanyang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan: Tidak ada
- i. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Maksud kegiatan :
 - (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
 - (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan tersebut;
 - (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
 - b. Sasaran kegiatan :
 - (1) Program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (2) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga.

c. Hasil kegiatan :

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
- (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.

d. Anggaran: Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Realisasi anggaran: Rp. 61.352.217,00 (enam puluh satu juta rupiah tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

e. Permasalahan yang dihadapi :

- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait bidang Pemerintahan dan Kesra termonev semuanya;
- (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai anggota tim Monev.

f. Solusi yang ditempuh :

- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelengkapan dilakukan lebih maksimal lagi;
- (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Kesra.

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -

h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

j. Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi

a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu:

- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (*output*).
- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut

yang meliputi terhadap hasil (*outcome*) dan sisi manfaat (*benefit*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

- (3) Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan.
 - (4) Mendapatkan data-data dan fakta sebagai *inform decision* guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.
- b. Hasil kegiatan adalah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2016 yang berisi hasil Focus Group Discussion (FGD) sektor Pariwisata dan Pertanian serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan
 - c. Sasarannya adalah program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang ekonomi diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM, pariwisata, perdagangan, perindustrian, jasa dan keuangan, desa berdikari serta ketenaga kerjaan.
 - d. Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 46.179.100,- (Empat puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau sebesar 92,36% (Sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen).
 - e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2016, Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016.
 - f. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.
 - g. Solusi yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di SKPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiansikan dari sisi waktu pelaksanaan.
 - h. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sangat baik dan mendukung terlaksananya program dan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
- k. *Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)*

- a. Maksud Kegiatan: Melakukan inventarisasi penyebab emisi dan sektor penyumbang emisi terbesar di Purbalingga sebagai dukungan pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau untuk sektor berbasis lahan di Kabupaten Purbalingga dengan tujuan memberikan rekomendasi, intervensi dan referensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang mendukung penurunan emisi serta meningkatkan nilai ekonomis yang tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- b. Hasil Kegiatan: Dokumen Low Emission Development (LED) Kabupaten Purbalingga.
- c. Sasaran kegiatan: Aksi mitigasi pembangunan rendah emisi ini menyoar pada sektor berbasis lahan (Kehutanan ,Pertanian dan Alih fungsi lahan).
- d. Anggaran sebesar Rp. 135.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 119.624.538,- (88 %).
- e. Permasalahan yang dihadapi: Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
- f. Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitas nya.
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.

I. WISMP

- a. Maksud Kegiatan : Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A
- b. Hasil Kegiatan : 1. Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP; 2. Terselenggaranya Revitalisasi Kepengurusan Kelembagaan Komisi Irigasi; 3 . Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM; 4. Tersedianya dokumen laporan kegiatan Masing-masing TPM di Daerah Irigasinya; 5. Tersedianya dokumen laporan triwulan KTPM
- c. Sasaran Kegiatan : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
- d. Anggaran sebesar Rp. 223.543000,- realisasi Rp. 197.867.702,- (88,51 %)
- e. Permasalahan yang dihadapi : -
- f. Solusi yang ditempuh : -
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tahun 2016 telah dilaksanakan Revitalisasi Kepengurusan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) tetapi belum

dikukuhkan/dilantik sehingga tahun 2017 diharapkan segera di lakukan pengukuhan pengurus KOMIR baru

- m. Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan
- a) Maksud Kegiatan : Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang keciaptakaryaan (air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman, dan persampahan).
 - b) Hasil Kegiatan : Terkoordinasinya pelaksanaan 5 Program Bidang Keciaptakaryaan
 - c) Sasaran Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan program dan terfasilitasinya usulan program bidang keciaptakaryaan
 - d) Anggaran sebesar Rp. 74.180.000,00 dengan realisasi Anggaran: Rp. 50.146.490,00
 - e) Permasalahan yang dihadapi : -
 - f) Solusi yang ditempuh : -
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- n. Pendidikan Untuk Semua (Bangub)
- a) Maksud kegiatan :
 - (1) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
 - (2) Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga
 - (3) Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kinerja Forum Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai wadah koordinasi antar *stakeholder*.
 - (4) Mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Purbalingga.
 - (5) Mengidentifikasi dan dan memetakan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
 - (6) Sebagai bentuk fasilitasi dan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
 - (7) Memberikan rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan

- (8) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
- b) Sasaran kegiatan :
- (1) OPD yang mengampu program dan kegiatan bidang pendidikan
 - (2) BPS dan Kantor Kementerian Agama
 - (3) UPT Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan
 - (4) K3S SD dan MKKS SMP, SMA, dan SMK
 - (5) Kwartir Gerakan Pramuka
 - (6) Para Pengawas dan Penilik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
 - (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga
- c) Hasil kegiatan :
- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan
 - (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan, maka akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
 - (3) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
 - (4) Teridentifikasi dan dan terpetakan permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
 - (5) Terfasilitasinya upaya yang sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
 - (6) Diperolehnya rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan
 - (7) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
 - (8) Terlaksananya Rapat Koordinasi PUS
 - (9) Terlaksananya Workshop PUS
 - (10) Tersusunnya laporan akhir Pendidikan Untuk Semua.

- d) Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
Dan realisasi anggaran : Rp. 39.779.600 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 61.20 persen
- e) Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Relatif rendahnya capaian keuangan karena adanya pertimbangan efisiensi anggaran ketika ada informasi penundaan transfer DAU dari pusat, sehingga kegiatan penyusunan laporan PUS yang telah dianggarkan dan sedianya dilakukan dengan teknis konsinering dan dilaksanakan di luar kantor, dalam realisasinya dilakukan di dalam kantor, sehingga jasa akomodasi dan sewa gedung/ kantor tidak direalisasikan.
 - (2) Tidak semua kegiatan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam OPD terpantau dan termonev semuanya;
 - (3) Perlunya koordinasi yang lebih intensif dan upaya lebih optimal guna peningkatan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan
 - (4) Perlu penguatan kelembagaan Pendidikan untuk Semua baik kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua maupun Sekretariat Forum Pendidikan untuk Semua.
 - (5) Perlunya penyediaan data yang valid dan akurat dalam rangka penghitungan capaian target kinerja Pendidikan Untuk Semua..
- f) Solusi yang ditempuh :
- (1) Perlunya penguatan kelembagaan PUS
 - (2) Kegiatan sebaiknya dimulai pada awal tahun anggaran.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan :
Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- o. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bangub)
- a) Maksud kegiatan :
- (1) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan yodium
 - (2) Pengendalian peredaran garam konsumsi
 - (3) Pemantauan dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar
 - (4) Pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di masyarakat.
- b) Sasaran kegiatan :
- (1) Pedagang garam pada pasar tradisional

- (2) OPD yang mengampu kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan yodium, sosialisasi program pemerintah, dan OPD yang menangani penegakan regulasi
- (3) Aparatur pemerintah daerah.
- c) Hasil kegiatan :
 - (1) Tersedianya alat titrasi iodometri test sebanyak 2 (dua) unit.
 - (2) Terambilnya sampel, terukurnya sampel, dan tersosialisasikannya hasil pemeriksaan sampel garam pada 13 pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga
 - (3) Terlaksananya pembinaan dan pemberian teguran bagi pedagang yang menjual garam konsumsi yang tidak mengandung yodium
 - (4) Terlaksananya rapat koordinasi Pencegahan dan penanggulangan GAKY
- d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Realisasi anggaran : Rp. 47.315.571,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 94.63 persen
- e) Permasalahan yang dihadapi :
 - (1) Alat test garam yang tersedia kurang banyak sehingga sampel yang diperiksa menjadi terbatas.
 - (2) Perlunya pemeriksaan dan pemantauan secara periodik, minimal 3 kali dalam setahun sehingga dapat diperoleh data yang relatif akurat.
- f) Solusi yang ditempuh :
 - (1) Perlunya pengadaan alat dan refill titrasi kit pada tahun anggaran mendatang
 - (2) Penambahan intensitas pemeriksaan dan pemantauan pada tahun mendatang.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

4. Program Penelitian dan Pengkajian Daerah

Program Penelitian dan Pengkajian Daerah terdiri dari 2 kegiatan meliputi

- 1) Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan
 - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi ijin penelitian, kajian / penelitian, diseminasi hasil litbang, lomba krenova dan pameran hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kab. Purbalingga;
 - b) Hasil Kegiatan : Hasil kegiatan berupa terbitnya surat ijin penelitian sebanyak 595 surat; kajian sosial “Profil Perceraian Kabupaten Purbalingga Tahun 2015; Diseminasi “Ketahanan Keluarga”; Lomba Krenova Tingkat Kab. Purbalingga; Mengikuti Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Mengikuti pameran Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Solo.

- c) Sasaran Kegiatan : Para inventor, Akademisi, Instansi pemerintahan, Swasta dan Masyarakat.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- dan Realisasi Anggaran Rp. 148.359.150,- (Seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,9 persen.
 - e) Permasalahan yang dihadapi : Masih rendahnya kualitas SDM dan motivasi dibidang penelitian dan pengembangan, masih rendahnya penerapan hasil riset karena kurangnya informasi kemasyarakat tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang ada.
 - f) Solusi yang ditempuh : Peningkatan motivasi dan kapasitas SDM litbang dengan melakukan kajian/penelitian dan mengadakan lomba krenova tingkat Kabupaten, mengikutsertakan para inventor/peneliti dalam lomba krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah; serta mensosialisasikan/diseminasi hasil litbang dan mengikuti ajang pameran sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan hasil riset; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi stakeholders terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.
 - g) Kondisi sarana dan prasaranayang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik, hanya saja tidak memiliki SDM litbang;
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 2) Penyusunan Sistem Inovasi Daerah
- a) Maksud Kegiatan :
 - (1) Membuat rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar stakeholder (institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).
 - (2) Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546), pasal 3. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten/Kota dan pasal 5. Pasal 5 (ayat 2) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam: *Roadmap* penguatan SIDA; RPJMD; dan RKPD.
 - b) Hasil Kegiatan : Tersusunnya dokumen Roadmap Sistem Inovasi daerah Kab. Purbalingga Tahun 2017-2021.

- c) Sasaran Kegiatan : Institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).
 - d) Anggaran sebesar Rp. 149.600.000,-. (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan Realisasi Anggaran Rp. 140.470.675,- (Seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 94 persen.
 - e) Permasalahan yang dihadapi : Belum terintegrasinya penguatan inovasi di Kabupaten Purbalingga dan adanya penataan OPD yang baru sehingga agak menyulitkan ketika membahas fokus program prioritas dan rencana aksi.
 - f) Solusi yang ditempuh : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholders* dengan membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Purbalingga lewat Keputusan Bupati.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik.
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 3) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata
- a. Maksud kegiatan :
 - (1) Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga.
 - (2) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - (3) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
 - (4) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (5) Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
 - b. Sasaran kegiatan :
 - (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
 - (2) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
 - (3) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
 - c. Hasil kegiatan :

- (1) Terfasilitasinya mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
 - (2) Terlaksananya / teracarakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - (3) Terdatanya permasalahan riil dalam masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
 - (4) Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
 - (5) Tersusunya laporan kegiatan KKN tahun 2016
- d. Anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 159.050.513,- (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah). atau 93,01 persen
- e. Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
 - (2) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja
 - (3) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
 - (4) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- f. Solusi yang ditempuh :
- (1) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
 - (2) Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
 - (3) Optimalisasi koordinasi dengan OPD SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan: -

5. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan meliputi :

- 1) Penyusunan Data dasar dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kepada Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna data
 - b) Hasil Kegiatan : Tersedianya Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA); Buku Saku PDA; Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2016; Buku PDRB Kab. Purbalingga Tahun 2015, untuk SKPD dan wilayah Kecamatan; dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi Kab. Purbalingga Tahun 2015.
 - c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 230.000.000.- Realisasi Anggaran : Rp. 220.870.675,- (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 96 persen.
 - e) Permasalahan yang dihadapi : Masih kurang memadainya sumber data dan kemampuan SDM pada OPD/SKPD dalam pengelolaan data dan informasi .
 - f) Solusi yang ditempuh : kerjasama/kolaborasi dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik
 - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 2) Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD (Bangub)
 - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan Data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kpd Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna Data
 - b) Hasil Kegiatan : Tersedianya 80 Buku SIPD kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan 78 Buku SIPD Kecamatan Tahun 2016
 - c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 72.829.750,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97 persen
 - e) Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya sumber data yang dimiliki oleh SKPD/ instansi tingkat Kabupaten, masih adanya inkonsistensi dan kesalahan dalam pengisian data oleh SKPD, kurangnya kesadaran akan pentingnya data, sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi yang belum memadai di tingkat SKPD, masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan informasi.

- f) Solusi yang ditempuh : Mengikutsertakan seluruh SKPD, Kecamatan dan BPS dalam keterisian data.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik;
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

3) Validasi dan Verifikasi data PBDT tahun 2015

- a) Maksud kegiatan :
 - (1) Melakukan pemutakhiran data Basis Data Terpadu Tahun 2015 guna akurasi penentuan sasaran / *targetting* program – program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - (2) Bahwa sesuai komitmen dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, semua program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan *single data* / data tunggal. Data PBDT Tahun 2015 merupakan data yang dipergunakan, sehingga harus selalu ter update.
- b) Sasaran kegiatan : Kepala Keluarga Rumah Tangga (KRT) dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah sebanyak 117.652 jiwa dengan Anggota Rumah Tangga (ART) sebanyak 457.640 jiwa, yang dikelompokkan menjadi 4 desil.
- c) Hasil kegiatan : Tidak terealisasi
- d) Realisasi anggaran : Rp. 0 (0 persen)
- e) Permasalahan yang dihadapi :
 - (1) Berdasarkan hasil konsultasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial diperoleh informasi bahwa pada pertengahan tahun 2016 sedang dirumuskan alat atau tools untuk melakukan Verifikasi dan Validasi BDT Tahun 2015 yang akan segera disosialisasikan, sehingga sebaiknya menunggu *tools* tersebut disosialisasikan.
 - (2) Hal ini dimaksudkan karena sistem penetapan sasaran dalam jangka panjang perlu memperhatikan dinamika kemiskinan / status kesejahteraan yang dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga perlu *updating* BDT 2015. Mengingat beberapa kabupaten / kota telah melakukan pemutakhiran mandiri dari BDT 2015, namun dengan menggunakan metodologi dan alat / *tools* yang berbeda-beda sehingga perlu diseragamkan terutama mengenai prosedur dan metodologinya, sehingga data hasil MPM dapat *reliable* dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Adapun alat/ *tools* Verifikasi dan Validasi dimaksud baru disosialisasikan oleh TNP2K RI kepada 35 kabupaten / kota pada tanggal 22 Desember 2016, dengan nama Metode Pemutakhiran Mandiri (MPM) dengan sistem

On Demand Application (ODA) sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data BDT 2015.

- (4) ODA merupakan langkah awal untuk melakukan pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu dalam skala kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2016 baru dilakukan uji coba. Adapun uji coba di Jawa Tengah dilakukan di 1 (satu) kabupaten yakni Kabupaten Sragen.
- (5) Solusi yang ditempuh : Perlunya pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran mendatang
- (6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- (7) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

6. Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah.

Program penataan dan pengendalian ruang daerah terdiri dari 8 kegiatan antara lain:

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kegiatan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b) Hasil kegiatan adalah diterbitkannya 104 surat rekomendasi tata ruang oleh BKPRD Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 68 surat rekomendasi sesuai dengan tata ruang dan 36 surat rekomendasi tidak sesuai serta 51 jawaban tentang informasi tata ruang.
 - c) Sasarannya adalah terlayannya masyarakat dalam mendapatkan informasi tata ruang dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 41.032.453,- (68,39%).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 2) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
 - a) Maksud pelaksanaan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai salah satu tahapan dalam proses Peninjauan Kembali Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga; Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah

- b) Hasil kegiatan adalah (1) Dokumen Materi teknis Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga; (2) Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Review RTRW Kabupaten Purbalingga
 - c) Sasaran Kegiatan: Mengkaji struktur ruang dan pola ruang serta pemanfaatannya yang memiliki pengaruh dan potensi strategis dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga
 - d) Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi Rp. 345.431.048,00 (98,69 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 3) Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau
- a) Maksud program dan kegiatan Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau yaitu Memfasilitasi kegiatan dari pusat yang diimplementasikan di Kabupaten/Kota
 - b) Hasil kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Eco District, P3KP dan Kota Hijau.
 - c) Sasarannya adalah Pemerintah, masyarakat pegiat lingkungan dan komunitas peduli lingkungan
 - d) Anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- realisasi Rp. 131.654.322,- (15,6 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi adalah Tahun 2016 tidak ada kegiatan dari pusat yang dapat dilaksanakan oleh Pegiat Lingkungan sehingga penyerapan anggaran hanya $\pm 15\%$.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah Koordinasi dengan Kementerian yang membidangi.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan adalah Program P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau merupakan program berkelanjutan sampai dengan tahun 2018 sehingga dukungan kegiatan dan dana dari Pemerintah Daerah harus ada.
- 4) Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga Tahun 2011-2031
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga dengan maksud : (1) Melaksanakan tahapan proses peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga; (2) Untuk menyiapkan bahan dalam pengambilan keputusan pada proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten Purbalingga
 - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen Materi teknis hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga
 - c) Sasarannya adalah Rekomendasi tentang RTRW perlu atau tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW
 - d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 67.251.500,- (89,67 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.

- f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 5) Penyusunan DED Pelebaran Jalan Onje dan Jalan Jambukarang
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa.
 - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang
 - c) Sasarannya adalah peningkatan kapasitas jalan Onje dan Jalan Jambukarang dapat berjalan dengan baik.
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.525.000,- (95,05 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 6) Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa dan sekaligus memiliki fungsi ruang terbuka hijau.
 - b) Hasil kegiatan adalah dokumen DED Alun-alun Purbalingga
 - c) Sasarannya adalah meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau dan fungsi sosial ekonomi kota
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.442.500,- (94,89 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 7) Penyusunan Tapak Wisata Panusupan
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan tapak wisata panusupan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengembangan desa wisatapanusupan lebih tertata dan terencana.
 - b) Hasil kegiatan adalah dokumen Tapak Wisata Panusupan
 - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata panusupan
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.503.500,- (90,01 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 8) Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Serang
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan rencana tata ruang desa Serang dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengembangan desa wisataserang lebih tertata dan terencana.

- b) Hasil kegiatan adalah dokumen Rencana Tata Ruang Desa Serang
 - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata serang
 - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.574.500,- (99,15 %).
 - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 9) Kegiatan Bersumberdana Pemerintah Pusat
Bappeda pada tahun 2016 tidak menyelenggarakan kegiatan yang bersumber anggaran dari APBN.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2016 Bappeda mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 8.653.649.000,- yang naik sebesar 16,82 % dari Rp. 7.407.704.000,- pada tahun 2015. Anggaran sejumlah Rp. 8.653.649.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 2.889.263.000 (33,39%) dan belanja langsung sebanyak Rp. 5.764.386.000 (64,61%)

Realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.479.197.819 atau 86,43 % yang terdiri dari belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp. 2.747.144.202,- (95,08 %) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 2.889.263.000,-, sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 5.764.386.000,- direlaisasikan sebesar Rp. 4.732.053.617,- (82,09 %).

Secara umum perbandingan belanja dan realisasi selama lima tahun seperti tergambar [ada tabe l dibawah ini, terlihat bahwa dari tahun ketahun persentase realisasi keuangan semakin menurun hal ini terlihat pada grafik dibawah ini. Persentase realiasi belanja tidak langsung lebih menunjukkan konsistensi bila dibandingkan dengan belanja langsungnya.

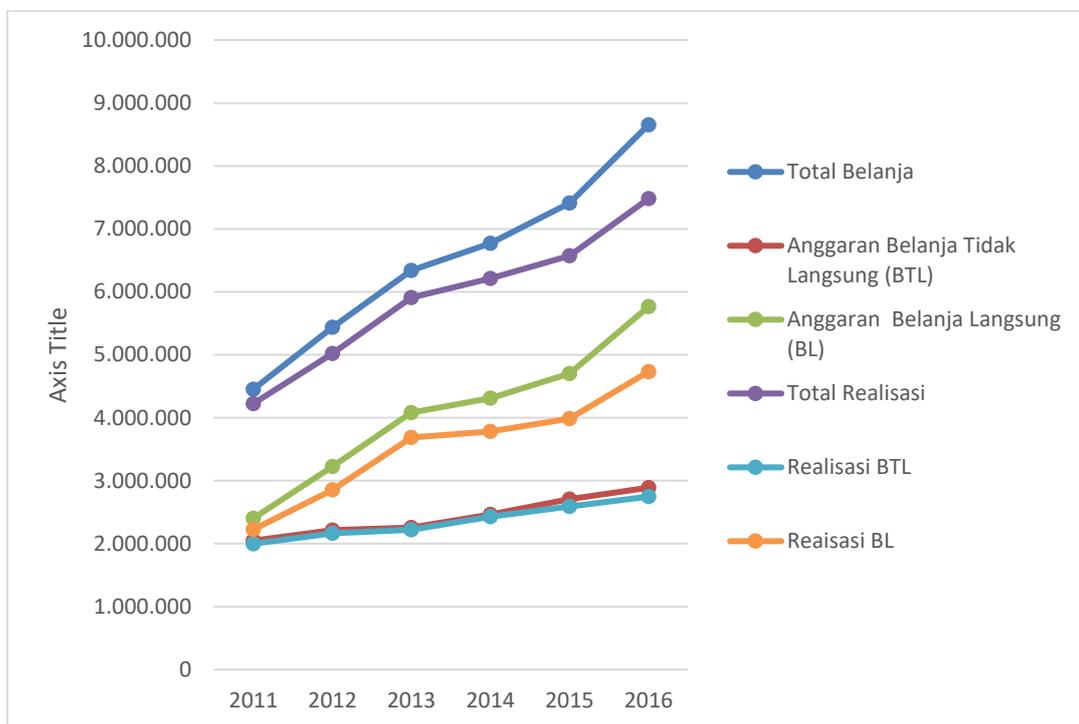
Tabel 6

Perbandingan Total Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Tidak Langsung
Bappeda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011-2016

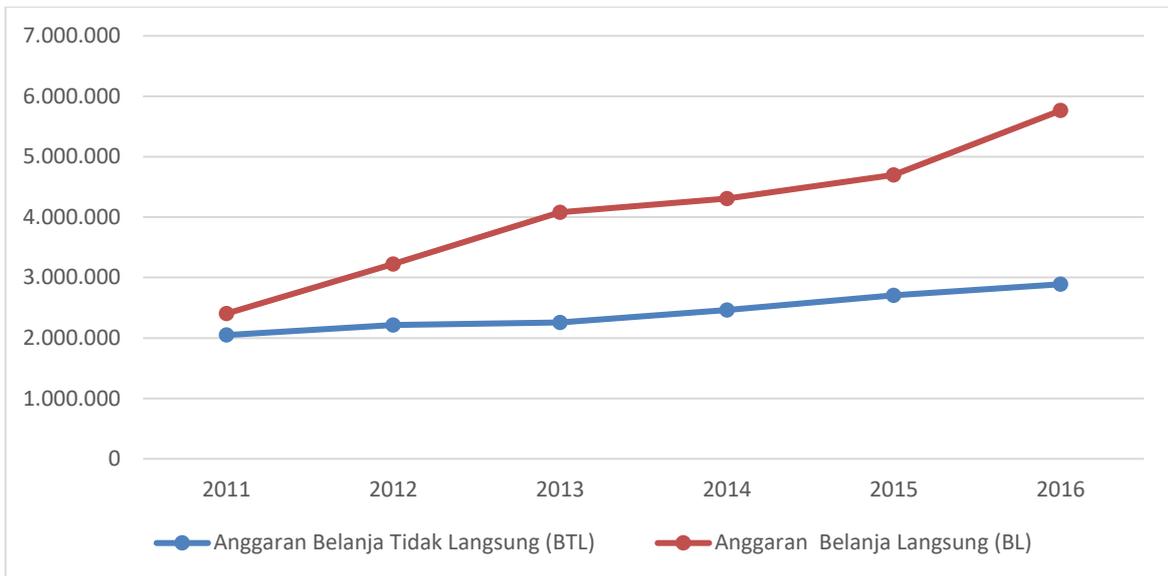
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Belanja	4.452.694	5.437.837	6.337.776	6.770.153	7.407.704	8.653.649
2	Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.048.578	2.213.006	2.257.785	2.462.147	2.706.555	2.889.263
3	Anggaran Belanja Langsung (BL)	2.404.116	3.224.831	4.079.991	4.308.006	4.701.149	5.764.386
4	Total Realisasi	4.224.388	5.019.455	5.907.966	6.211.427	6.574.489	7.479.198
5	Realisasi BTL	1.999.159	2.164.439	2.220.439	2.429.976	2.589.219	2.747.144
6	Reaisasi BL	2.225.229	2.855.016	3.687.527	3.781.452	3.985.270	4.732.054

7	Proporsi BTL terhadap Total Belanja	46,01%	40,70%	35,62%	36,37%	36,54%	33,39%
8	Proporsi BL terhadap Total Belanja	53,99%	59,30%	64,38%	63,63%	63,46%	66,61%
9	Persentase Realisasi Belanja	94,87%	92,31%	93,22%	91,75%	88,75%	86,43%
10	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung	97,59%	97,81%	98,35%	98,69%	95,66%	95,08%
11	Persentase Realisasi Belanja Langsung	92,56%	88,53%	90,38%	87,78%	84,77%	82,09%

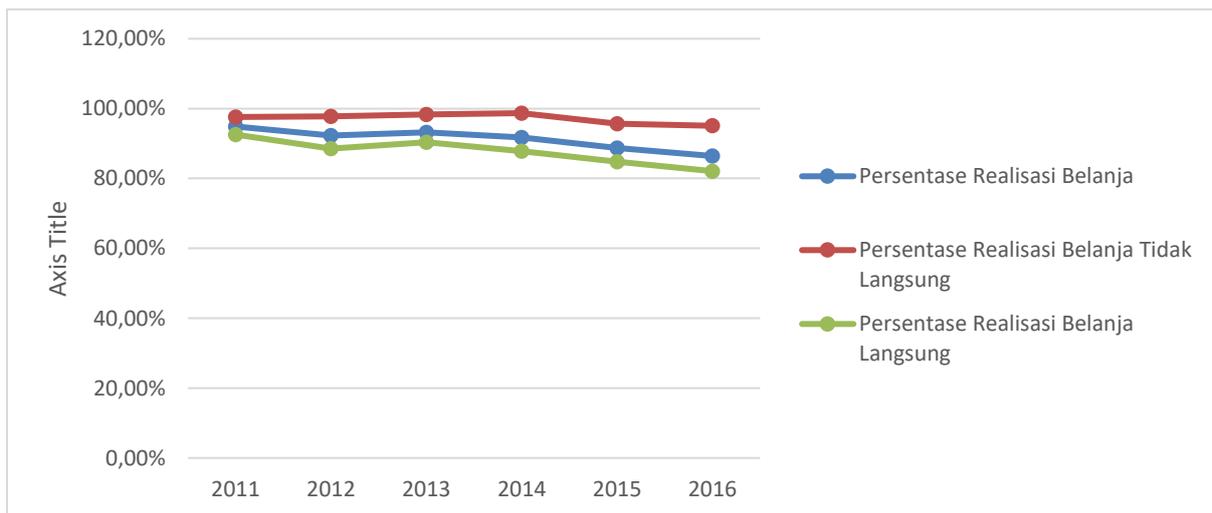
Grafik 1
Perbandingan anggaran Belanja dan Realisasi Belanja
Bappeda Kab. Purbalingga
Tahun 2011-2016



Grafik 2
Proporsi Belanja pada Bappeda Kabu. Purbalingga
Tahun 2011-2016



Grafik 2
Perbandingan Realisasi Belanja
Bappeda Kab. Purbalingga
Tahun 2011-2016



Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2016 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini.

Tabel 7
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016
BAPPEDA KABUPATEN PURBALINGGA

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase
	BELANJA DAERAH	7.407.704.000	6.574.488.925	833.215.075	88,75
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.706.555.000	2.589.219.123	117.335.877	95,66
1	Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai	2.706.555.000	2.589.219.123	117.335.877	95,66
II	BELANJA LANGSUNG	4.701.149.000	3.985.269.802	715.879.198	84,77
A	Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	512.918.000	387.696.686	125.221.314	75,59
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	67.821.000	50.400.500	17.420.500	74,31
2	Analisis Interpretasi Peta GPS Geodetik	89.297.000	-	89.297.000	-
3	Pencetakan Peta Kabupaten Purbalingga	50.000.000	45.783.000	4.217.000	91,57
4	Identifikasi dan Analisis Potensi Lokasi Industri	150.000.000	147.682.500	2.317.500	98,46
5	Fasilitasi Eco Distrik Perkotaan Purbalingga	155.800.000	143.830.686	11.969.314	92,32
B	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.606.277.000	1.427.970.049	178.306.951	88,90
1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	453.161.000	371.910.487	81.250.513	82,07
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	260.000.000	259.809.637	190.363	99,93
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	330.722.000	261.094.925	69.627.075	78,95
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	423.544.000	407.912.500	15.631.500	96,31
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	60.000.000	59.425.000	575.000	99,04
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	18.850.000	15.394.000	3.456.000	81,67
7	Penataan Arsip	20.000.000	17.970.000	2.030.000	89,85
8	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	40.000.000	34.453.500	5.546.500	86,13
C	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	770.110.000	649.308.030	120.801.970	84,31
1	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Kabupaten	51.319.000	49.675.500	1.643.500	96,80

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase
2	Penyusunan KUA PPAS RAPBD 2016	75.000.000	68.722.800	6.277.200	91,63
3	Penyusunan RKPD	139.290.000	127.697.675	11.592.325	91,68
4	Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2020	153.500.000	119.589.874	33.910.126	77,91
5	Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah	25.000.000	18.135.850	6.864.150	72,54
6	Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2015	65.000.000	58.484.860	6.515.140	89,98
7	Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	-
8	Penyusunan RKPD Perubahan	79.991.000	67.748.818	12.242.182	84,70
9	Fasilitasi SIMRENDA	69.754.000	65.800.950	3.953.050	94,33
11	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	60.256.000	22.536.278	37.719.722	37,40
12	Penyusunan Roadmap Pengembangan Gula Kelapa Organik	51.000.000	50.915.425	84.575	99,83
D	Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.388.101.000	1.118.379.897	269.721.103	80,57
1	Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	138.100.000	120.308.250	17.791.750	87,12
2	FEDEP	99.984.000	78.655.228	21.328.772	78,67
3	Pendampingan Program WISMP	79.000.000	21.686.250	57.313.750	27,45
4	Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan	69.631.000	45.809.150	23.821.850	65,79
5	Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	228.015.000	211.773.425	16.241.575	92,88
6	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban Gub)	71.100.000	38.397.425	32.702.575	54,00
7	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	25.000.000	24.172.000	828.000	96,69
8	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	56.000.000	43.393.250	12.606.750	77,49
9	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	36.700.000	27.825.300	8.874.700	75,82
10	WISMP	175.000.000	147.501.950	27.498.050	84,29
11	Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Purbalingga	71.725.000	68.920.500	2.804.500	96,09

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase
12	Fasilitasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dan Komunitas Hijau	83.000.000	77.169.000	5.831.000	92,97
13	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kab Pbg (2010-2014)	60.000.000	56.594.500	3.405.500	94,32
14	Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Sanitasi	53.000.000	43.400.750	9.599.250	81,89
15	Pendampingan Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)	73.207.000	64.596.855	8.610.145	88,24
16	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	50.000.000	37.737.500	12.262.500	75,48
17	Penyusunan RAD AMPL Kab.Purbalingga	18.639.000	10.438.564	8.200.436	56,00
E	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	423.743.000	401.915.140	21.827.860	94,85
1	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	116.334.000	115.929.888	404.112	99,65
2	Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah	177.138.000	176.856.502	281.498	99,84
3	Penyusunan Profil Daerah (Bangub)	75.000.000	73.662.250	1.337.750	98,22
4	Fasilitasi Tim Koordinasi Pemutakiran Basis Data Terpadu PPLS 2015	55.271.000	35.466.500	19.804.500	64,17
		7.407.704.000	6.574.488.925	833.215.075	88,75

BAB IV

PENUTUP

Peran dan posisi BAPPEDA yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun – tahun mendatang diharapkan menunjukkan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan BAPPEDA, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja BAPPEDA secara keseluruhan.

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui:

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA sehingga produk BAPPEDA akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya
3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di BAPPELITBANGDA.
4. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui rapat koordinasi yang lebih luas sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

5. Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2011 - 2016.

Purbalingga, Februari 2017

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

**KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013**